policy brief
No. 61 /Agustus 2021

PUSAT KAJIAN PERTANIAN PANGAN & ADVOKASI

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Perbaikan Tata Kelola CBP dan Reformasi Kelembagaan Stabilisator Ke Arah Komersial

DASAR PEMIKIRAN

Menjaga ketahanan pangan di Pandemi Covdi-19. Pemerintah melalui Kemensos menyalurkan Bantuan Sosial Beras kepada masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunas (BPNT) atau kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di masa PPKM penyaluran BSB Kemensos bekerjasama dengan BULOG, dengan target 10 kg kepada 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu sembako non tunai. Semenatara Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersedia di BULOG 1.5 juta ton – 2 juta ton. Padahal CPN diperuntukan penanggulangan keadaan darurat, bencana dan kerawanan pangan pasca bencana.

KAJIAN EMPIRIS

Dalam program Raskin/Rastra, integrasi pengadaan (hulu), pengelolaan stok (tengah) hingga penyaluran (hilir) terjamin. Setelah Raskin/Rastra diubah jadi BPNT, integrasi terbuka di hilir tapi tidak ada lagi penyaluran bagi stok besar yang tidak pasti. Ini membuat stok menumpuk dan rusak atau BULOG mengurangi pengadaan domestik yang membuat petani tidak lagi terlindungi. Sejak tahun 2018, Operasi Pasar KPSH sepanjang tahun jadi andalan outlet BULOG. OP merupakan kebijakan yang salah, karena pemerintah menghidupkan kembali subsidi non-target. Tampa outlet pasti, operasional BULOG serba tak pasti.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah perlu menjaga agar tidak terjadi hambatan distribusi pangan baik *continental* antar wilayah di suatu daratan maupun antar pulau di seluruh Indonesia.
2. Pemerintah harus membuka *Captive market* beras BULOG, saat ini tidak ada ruang penyaluran sehingga harga dan pasokan sangat tergantung pasar. Seharusnya stok beras 1-1.5 juta ton memerlukan *Captive Market* sebesar 250.000-375.000 ton/bulan sehingga habis selama 4 bulan.
3. Pemerintah harus menghapus program BPNT karena prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau (*PoU*) pada 2020 naik 0,71% disebabkan peningkatan angka kemiskinan 54% atau setara 2.152.159 jiwa. Justifikasi terjadi penurunan akses pangan disebabkan daya beli masyarakat semakin menurun akibat Bansos BPNT tetap dijalankan dengan volume menjadi semakin besar.
4. Pemerintah pusat harus Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Pusat dan Daerah guna mendorong setiap Provinsi/Kabupaten/Kota membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
5. Pemerintah perlu merubah sistem penggantian karena dana yang tersimpan di Kementerian Keuangan selama ini yang belum dibayarkan pemerintah akan membuat beban biaya yang harus ditanggung BULOG.
6. Pemerintah harus menggeser organ penting BULOG dari Lembaga PSO menjadi ke arah komersial. Secara konvensional BULOG dengan pengelolaan CBP hanya diperuntukkan jika ada bencana alam dan keperluan stabilisasi harga.
7. Pemerintah perlu penguatan lini hulu dan infrastruktur pengadaan ke petani yang lebih ofensif dan sistem pembiayaan dan pengadaan, serta penetrasi ke pasar komersial, baik domestik maupun regional. Juga melakukan pembaruan administrasi keuangan publik keuangan perusahaan.
8. Pemerintah harus melindungi petani sebagai produsen pangan. Juga melindungi penggilingan padi skala kecil yang menjadi pilar bagi sistem produksi pangan. Pada 2016 tren pengadaan turun terus dan jika dibiarkan maka BULOG tinggal nama saja, namun BULOG juga harus merubah diri dengan segala resikonya.
9. Pemerintah perlu didorong membentuk sebuah kerjasama PPPP (*public private producer partnership)* dalam menjalankan penyediaan, stabilitas harga melalui Lembaga terkait. Pihak swasta yang bergerak dibidang logistik pergudangan, teknologi dan akses pasar, serta pihak petani sebagai pelaksana produksi dan operasional lapangan menghasilkan pangan yang berkualitas dan sehat.